

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024**

BPSIP Kep.Babel
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl.Mentok Km-4 Pangkalpinang 33134

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP Kep.Babel adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Kep.Babel mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP Kep.Babel. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Pangkalpinang, 31 Desember 2024
Kepala BPSIP Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Dana yang dibatasi penggunaan

C.3.2. Aset Lainnya

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang untuk di serahkan ke Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

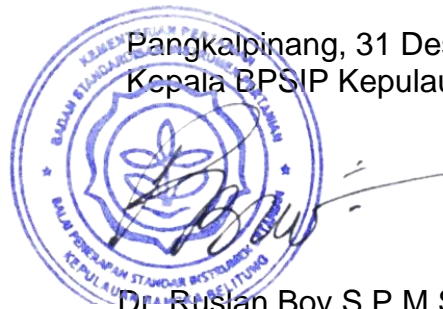
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Kep.Babel yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2024
Kepala BPSIP Kepulauan Bangka Belitung,



Dr. Ruslan Boy,S.P,M.Si

NIP. 197203302 200701 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Kep.Babel Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.223.322.696,00 atau mencapai 176% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.126.912.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.6.122.914.635,00 atau mencapai 93% dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.573.689.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.124.240.705.248,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.70.369.582,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.123.970.335.666,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.200.000.000,00, Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 212.480.397,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 212.480.397,00 dan Rp. 124.028.224.851,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.190.441.071,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.6.908.120.166,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.-6.717.679.095,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.203.268.400,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.-6.514.410.695,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp.124.619.043.607,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.-6.514.410.695,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.5.923.591.939,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.124.028.224.851,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSIP KEP.BABEL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	126.912.000,00	223.322.696,00	176	89.099.734,00
Jumlah Pendapatan		126.912.000,00	223.322.696,00	176	89.099.734,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3.	2.067.734.000,00	2.019.097.022,00	98	1.917.300.516,00
Belanja Barang	B.4.	4.344.955.000,00	3.942.826.613,00	91	3.524.070.106,00
Belanja Modal	B.5.	161.000.000,00	160.991.000,00	100	0,00
Jumlah Belanja		6.573.689.000,00	6.122.914.635,00		5.441.370.622,00

II. NERACA

**BPSIP KEP.BABEL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	63.758.375,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	(318.793,00)	0,00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3.	63.439.582,00	0,00
Persediaan	C.1.4.	6.930.000,00	906.000,00
Jumlah Aset Lancar		70.369.582,00	906.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	108.009.230.000,00	108.009.230.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.924.164.437,00	7.924.164.437,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17.754.485.316,00	17.593.494.316,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	3.819.508.800,00	3.819.508.800,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	34.944.000,00	34.944.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-13.571.996.887,00	-12.750.316.869,00
Jumlah Aset Tetap		123.970.335.666,00	124.631.024.684,00
Aset Lainnya			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.1.	200.000.000,00	0,00
Aset lain-lain	C.3.2.	3.726.000,00	3.726.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-3.726.000,00	-3.726.000,00
Jumlah Aset Lainnya		200.000.000,00	0,00
Jumlah aset		124.240.705.248,00	124.631.930.684,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	212.480.397,00	12.887.077,00
Jumlah Kewajiban		212.480.397,00	12.887.077,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1.	124.028.224.851,00	124.619.043.607,00
Jumlah Ekuitas		124.028.224.851,00	124.619.043.607,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		124.028.224.851,00	124.631.930.684,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPSIP KEP.BABEL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	190.441.071,00	86.509.734,00
JUMLAH PENDAPATAN		190.441.071,00	86.509.734,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.019.097.022,00	1.917.300.516,00
Beban Persediaan	D.3.	255.458.980,00	79.170.575,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.383.593.808,00	2.329.353.303,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	935.983.930,00	753.241.757,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	367.479.215,00	389.493.548,00
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	124.508.400,00	41.092.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	821.680.018,00	945.919.611,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	318.793,00	0,00
JUMLAH BEBAN		6.908.120.166,00	6.455.571.810,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6.717.679.095,00	-6.369.062.076,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	203.268.400,00	52.082.500,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	203.268.400,00	60.557.500,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	0,00	8.475.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		203.268.400,00	52.082.500,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-6.514.410.695,00	-6.316.979.576,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6.514.410.695,00	-6.316.979.576,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPSIP KEP.BABEL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	124.619.043.607,00	125.829.251.943,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6.514.410.695,00	-6.316.979.576,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-245.499.648,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	-245.499.648,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.923.591.939,00	5.352.270.888,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-590.818.756,00	-1.210.208.336,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	124.028.224.851,00	124.619.043.607,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Kep.Babel

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi” Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mencapai visi yang di capai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut: 1) Mewujudkan ketahanan pangan. 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. 3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Kep.Babel. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Kep.Babel menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP Kep.Babel dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Kep.Babel yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Kep.Babel adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2024

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2024

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhiyung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	100%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musin Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Kep.Bebel telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, luaran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	126.912.000,00	126.912.000,00
Jumlah Pendapatan	126.912.000,00	126.912.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.166.550.000,00	1.954.399.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	62.410.000,00	62.910.000,00
Belanja Lembur	50.670.000,00	50.425.000,00
Belanja Barang Operasional	1.179.530.000,00	1.227.450.000,00
Belanja Barang Non Operasional	961.905.000,00	892.008.000,00
Belanja Barang Persediaan	343.883.000,00	324.735.000,00
Belanja Jasa	381.740.000,00	340.720.000,00
Belanja Pemeliharaan	828.274.000,00	950.812.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	593.080.000,00	609.230.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	161.000.000,00
Jumlah Belanja	6.568.042.000,00	6.573.689.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang terakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar RP.223.322.696,00.atau mencapai 175,97% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.126.912.000,00 Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	126.912.000,00	190.441.071,00	150,06
Pendapatan Lain-lain. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	32.881.625,00	0,00
Jumlah	126.912.000,00	223.322.696,00	175,97

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 175,97% dibandingkan TA 2023, dikarenakan hasil produksi pertanian sudah bisa di pungut dan disetorkan ke kas negara berupa hasil penjualan buah sawit, getah karet, pupuk kandang, benih padi dan adanya pengembalian kelebihan tunjangan Fungsional . Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Kep.Babel adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Reaklisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan	117.844.500,00	73.396.674,00	60,55
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	12.596.571,00	13.113.060,00	-3,93
Pendapatan Lain-lain. Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	32.881.625,00	2.590.000,00	1.170
Jumlah	223.322.696,00	89.099.734,00	150,64

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar RP.6.122.914.653,00 atau 93% dari anggaran belanja sebesar Rp.6.573.689.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.067.734.000,00	2.019.097.022,00	98
Belanja Barang	4.344.955.000,00	3.942.826.613,00	98
Belanja Modal	161.000.000,00	160.991.000,00	100
Total Belanja Kotor	6.573.689.000,00	6.122.914.635,00	93
Total Belanja	6.573.689.000,00	6.122.914.635,00	93

Dibandingkan dengan tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami Peningkatan sebesar 12,52% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Karena adanya penambahan pegawai PPPK , belanja Barang pemeliharaan dan belanja Modal untuk tahun anggaran 2024 anggarannya meningkat.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	2.019.097.022,00	1.917.300.516,00	5,30
Belanja Barang	3.942.826.613,00	3.524.070.106,00	11,8
Belanja Modal	160.991.000,00	0,00	0,00
Total Belanja	6.122.914.635,00	5.441.370.622,00	12,52

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.019.097.022,00 dan Rp. 1.917.300.516,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,30% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena : adanya penambahan pegawai PPPK.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.912.026.838,00	1.899.216.516,00	0,67
Belanja Lembur PNS	44.726.000,00	18.084.000,00	147,3
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	60.788.184,00	0,00	
Belanja Lembur PPPK	1.556.000,00	0,00	
Jumlah Kotor	2.019.097.022,00	1.917.300.516,00	5,30
Jumlah Belanja	2.019.097.022,00	1.917.300.516,00	5,30

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.942.826.613,00 dan Rp. 3.524.070.106,00. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,8% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penambahan anggaran dan kegiatan bertambah sehingga kebutuhan belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan meningkat.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.227.065.965,00	1.125.186.164,00	9,05
Belanja Barang Non Operasional	830.806.659,00	884.382.967,00	-6,05
Belanja Barang Persediaan	255.297.980,00	66.195.325,00	285,6
Belanja Jasa	314.787.864,00	306.897.095,00	2,57
Belanja Pemeliharaan	947.388.930,00	751.915.007,00	25,9
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	367.479.215,00	389.493.548,00	-5,65
Jumlah Belanja Kotor	3.942.826.613,00	3.524.070.106,00	11,8
Jumlah Barang	3.942.826.613,00	3.524.070.106,00	11,8

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar RP.160.991.000,00 dan Rp.0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penganggaran untuk belanja modal berupa gedung dan bangunan (pagar) di tahun 2024.

Perbandingan Belanja Modal
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.991.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	160.991.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	160.991.000,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.758.375,- dan Rp.0,00. Piutang bukan Pajak merupakan sisa pengembalian Tunjangan Jabatan Fungsional pada BPSIP Kepulauan Bangka Belitung.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	63.758.375,00	0,00
Jumlah	63.758.375,00	0,00

C.1.2 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6.930.000,00 dan Rp.906.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	6.930.000,00	906.000,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Jumlah	6.930.000,00	906.000,00

Tabel Mutasi Barang Persediaan

Uraian	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Awal	26	906.000,00
B. Mutasi Tambah	58,354	400.544.993,00
C. Mutasi Kurang	53,252	394.520.993,00
D.Saldo Akhir	5,128	6.930.000,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Barang Konsumsi adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Barang Konsumsi senilai Rp.400.544.993,00

Mutasi kurang atas nilai Barang Konsumsi senilai Rp.394.520.993,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Kep.Babel per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.108.009.230.000,00 dan Rp.108.009.230.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Kep.Babel per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.924.164.437,00 dan Rp.7.924.164.437,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.924.164.437,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	7.924.164.437,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-7.656.534.843,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	267.629.594,00

Tidak terdapat mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Kep.Babel per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.17.754.485.316,00 dan Rp.17.593.494.316,00.

C.2.4. Jalan,Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Kep.Babel per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.819.508.800,00 dan Rp.3.819.508.800,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPSIP Kep. Bebal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.34.944.000,00 dan Rp. 34.944.000,00.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Kep.Babel per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-13.571.996.887,00 dan Rp.-12.750.316.869,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm.Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.924.164.437,00	-7.796.428.199,00	127.736.238,00
2.	Gedung dan Bangunan	17.754.485.316,00	-4.115.968.308,00	13.638.517.008,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.410.922.796,00	-1.659.600.380,00	751.322.416,00
4.	Aset Tetap Lainnya	34.944.000,00	0,00	34.944.000,00
Akumulasi Penyusutan		28.124.516.549,00	-13.571.996.887,00	14.552.519.662,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 dan Rp. 0,00. Dana Yang di Batasi Penggunaannya merupakan Aset berupa pembayaran belanja barang (523111) pada pemeliharaan gedung teknisi melalui mekanisme PRATA di bayar pada bulan Januari 2025.

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.726.000,00 dan Rp.3.726.000,00. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Lai-lain
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 September 2023	3.726.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
Saldo 31 Desember 2023	3.726.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-3.726.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0,00

Tidak terdapat Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Kep.Babel per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.- 3.726.000,00 dan Rp. -3.726.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm.Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi Penyusutan	0,00	-3.726.000,00	0,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.212.480.397,- merupakan pembayaran belanja barang (523111) pada pemeliharaan gedung teknis melalui mekanisme PRATA di bayar pada bulan Januari 2025 sebesar Rp.200.000.000,00, pembayaran tagihan telpon dan listrik bulan Desember 2024 di bayar pada bulan Januari 2025 sebesar Rp. 12.480.397,00.

C.5. EKUITAS

C.5.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 124.619.043.607,00 dan Rp.125.829.251.943,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 190.441.071,00 dan Rp. 86.509.734,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	177.844.500,00	73.396.674,00	142,30
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.596.571,00	13.113.060,00	-3,93
Jumlah	190.441.071,00	86.509.734,00	120,12

Hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya meningkat dikarenakan hasil produksi pertanian sudah bisa di pungut dan disetorkan ke kas negara berupa hasil penjualan kelapa sawit, getah karet, pupuk kandang sapi dan benih padi.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.019.097.022,00 dan Rp. 1.917.300.516,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.300.633.500,00	1.229.274.240,00	5,80
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.532,00	20.905,00	2,99
Beban Tunj. Anak PNS	33.951.612,00	30.567.284,00	11,07
Beban Tunj. Beras PNS	76.041.000,00	76.692.780,00	-0,84
Beban Tunj. Fungsional PNS	151.750.000,00	193.590.000,00	-21,61
Beban Tunj. PPh PNS	10.780.504,00	6.274.777,00	71,80
Beban Struktural PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0
Beban Suami/Istri PNS	99.721.690,00	89.420.670,00	11,51
Beban Tunjangan Umum PNS	24.340.000,00	28.350.000,00	-14,14
Beban Uang Makan PNS	189.587.000,00	203.216.000,00	-6,70
Beban Lembur PNS	44.726.000,00	48.670.000,00	-8,10
Beban Gaji Pokok PPPK	44.850.400,00	11.866.000,00	277,9
Beban Pembulatan Gaji PPPK	904,00	180,00	402,2
Beban Tunj.Fungsional PPPK	7.560.000,00	2.160.000,00	250
Beban Tunj. Beras PPPK	1.013.880,00	289.680,00	250
Beban Uang Makan PPPK	7.363.000,00	2.294.000,00	220,9
Beban Uang Lembur PPPK	1.556.000,00	0,00	0
Jumlah	2.019.097.022,00	1.917.300.516,00	5,30

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar RP. 255.458.980,00 dan Rp. 79.170.575,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	207.636.130,00	4.015.000,00	-100
Beban Persediaan konsumsi	47.822.850,00	75.155.575,00	-36,36
Beban persediaan suku cadang	0,00	0,00	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	0,00	0
Jumlah	255.458.980,00	79.170.575,00	222,6

Realisasi per 31 Desember 2024 untuk beban persediaan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya transfer benih dari BB Padi.

Beban persediaan terdapat selisih sebesar Rp.3.383.612,- antara LRA dengan mutasi pembelian barang persediaan karena pembelian persediaan tidak menggunakan Akun persediaan tetapi dilakukan pendetilan kode barang yang terdiri dari Rp.2.663.613 kuitansi pembelian berlangganan QR Code menggunakan Akun 523136 dan Rp.12.060.000,- pembelian barang pemeliharaan jaringan Wibesite menggunakan Akun 523136, serta terdapat pembelian barang persediaan untuk keperluan belanja barang senilai Rp.11.340.000,- tidak menggunakan Akun 521811, sehingga tidak tercatat di mutasi pembelian barang persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.383.593.808,- dan Rp. 2.329.353.303,- beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	773.578.094,00	804.762.722,00	-3,87
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.970.000,00	8.638.000,00	38,57
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.999.309,00	0,00	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68.880.000,00	111.532.800,00	-38,24
Beban Barang Operasional Lainnya	366.638.562,00	200.252.642,00	83,08
Beban Bahan	546.146.659,00	575.222.967,00	-5,05
Beban Barang Non Operasional Lainnya	296.000.000,00	309.160.000,00	-4,25
Beban Langganan Listrik	188.046.315,00	194.279.640,00	-3,20
Beban Langganan Telpon	78.442.247,00	71.390.455,00	9,84
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	29.342.622,00	0,00	0
Beban Sewa	0,00	20.327.000,00	-149,19
Beban Jasa Profesi	18.550.000,00	20.900.000,00	-11,24
Jumlah	2.383.593.808,00	2.329.353.303,00	2,32

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.935.983.930,00 dan Rp. 753.241.757,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	571.896.547,00	477.688.987,00	19,72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	360.768.770,00	274.226.020,00	31,55
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	405.000,00	1.326.750,00	-69,47
Beban Persediaan suku cadang	2.913.613,00	0,00	0
Jumlah	935.983.930,00	753.241,757,00	24,26

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.367.479.215,00 dan Rp. 389.493.548,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	367.479.215,00	389.493.548,00	-5,65
Jumlah	367.479.215,00	389.493.548,00	-5,65

D.7. Beban Barang Untuk Di Serahkan Ke Masyarakat

Jumlah beban barang untuk di serahkan ke Masyarakat periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.124.508.400,- dan Rp. 41.092.500,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk barang yang di serahkan ke Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.satuan kerja. Barang untuk diserahkan ke Masyarakat berupa benih yang berasal dari kegiatan Perbenihan Padi dan Jagung yang telah tersertifikasi.

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	124.508.400,00	41.092.500	202,9
Jumlah	124.508.400,00	41.092.500	202,9

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.821.680.018,00 dan Rp. 945.919.611,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	446.072.596,00	444.283.805,00	-0,40
Beban Penyusutan Irigasi	69.590.099,00	69.590.099,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	136.284.779,00	136.284.779,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	29.839.188,00	29.839.188,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.893.356,00	265.921.740,00	-47,39
Jumlah	821.680.018,00	945.919.611,00	-13,13

Realisasi beban penyusutan berkurang dari tahun sebelumnya di karenakan tidak adanya pengadaan gedung dan bangunan, irigasi dan jembatan, jaringan, peralatan dan mesin.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan aset Non Lancar	0,00	0,00	-100
Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	-100

Perbandingan pos kegiatan non operasional tahun berjalan dengan tahun lalu adalah tahun berjalan tidak terdapatnya pelepasan aset non lancar karena tahun lalu sudah di adakannya pelepasan aset non lancar berupa hasil lelang ternak sapi pada tahun 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.124.619.043.607,00 dan Rp. 125.829.251.943,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.-6.514.410.695,00 dan Rp.-6.316.979.576,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. -245.499.648,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. -245.499.648,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.923.591.939,00 dan Rp. 5.352.270.888,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar entitas per 31 Desember 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagikan ke Entitas Lain	6.122.914.635,00
Diterima dari Entitas Lain	-223.322.696,00
Jumlah	5.899.591.939,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp.- 223.322.696,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.6.122.914.635,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.124.028.224.851,00 dan Rp. 124.619.043.607,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

REKAP REVISI TA. 2024

Satker : BPSIP BABEL

Revisi	Jenis revisi	Tanggal DIPA	Rincian	Ket
1	DIPA	05-Jan-24	1. Refocusing anggaran 2. Perubahan kegiatan perbenihan (fokus kepada komoditas pangan/padi dan jagung) 3. Penghapusan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian	Instruksi Es. I
2	DIPA	23-Jan-24	Revisi perubahan kode blokir Program Dukungan Manajemen menjadi Automatic Adjusment (AA)	Usulan satker
3	POK	06-Feb-24	1. Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan I 2. Penyesuaian kenaikan gaji dan tunjangan PNS (gaji tunjangan 13 dan 14) sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2024	Usulan satker
4	POK	16-Apr-24	1. Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan II 2. Revisi pagu minus tunjangan PPh PNS dan gaji pokok PPPK	Usulan satker
5	POK	28-Mei-24	Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA Triwulan II karena terbitnya PER-5/PB/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang mengatur pedoman teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan 2 indikator perubahan yaitu deviasi Hal III DIPA dan Penyerapan anggaran	Instruksi Es. II
6	DIPA	06-Jun-24	1. Pembukaan blokir anggaran kegiatan teknis (Program Nilai Tambah dan Daya Saing, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas) 2. Pembukaan blokir PNPB dengan izin penggunaan 73%	Instruksi Es. I

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2024

7	POK	12-Jul-24	1. Revisi penambahan sub komponen kegiatan "Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Komoditas Pangan di Bangka Belitung" dengan anggaran Rp. 50.000.000,- yang berasal dari sub komponen "Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Komoditas Perkebunan di Bangka Belitung" 2. Perubahan judul sub komponen Pendampingan dan Pengujian Penerapan SNI Lada di Bangka Belitung menjadi Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bangka Belitung dan penyesuaian anggaran antar akun/sub komponen guna mendukung pelaksanaan kegiatan	Instruksi Es. II
8	DIPA	17-Sep-24	Penambahan KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan sub komponen pembangunan pagar IP2SIP Petaling berupa belanja modal sebesar Rp. 161.000.000,- yang dialihkan dari belanja gaji dan tunjangan pegawai (001)	Instruksi Es. I
9	POK	03-Okt-24	Revisi POK penyesuaian anggaran antar akun dalam 1 sub komponen dan penyesuaian Hal III DIPA	Usulan Satker
10	DIPA	07-Nov-24	Revisi penurunan target dan penggunaan PNBP	Usulan Satker
11	DIPA	15-Nov-24	Revisi pemblokiran anggaran perjalanan dinas (penghematan) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Total blokir penghematan perjadi Rp. 11.420.000	Tindak lanjut Surat Kemenkeu
12	DIPA	19-Nov-24	Perubahan kode blokir perjadi pada sub komponen hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi perkebunan dari kode "7" menjadi "9"	Usulan satker
13	POK	21-Nov-24	Penyesuaian belanja antar akun/komponen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada RO operasional dan pemeliharaan kantor	Usulan satker
14	DIPA	28-Nov-24	Penambahan anggaran pada sub komponen pemeliharaan gedung perkantoran untuk perbaikan gedung gudang dan arsiparis	Usulan satker

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2024

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Terdapat pengembalian kelebihan tunjangan jabatan fungsional pada BPSIP Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 96.640.000,-. Faftar nominative selisih tunjangan eks peneliti yang tetap di Kementerian Pertanian pada BPSIP Kepulauan Bangka Belitung terlampir

No	SATKER	NAMA DEBITUR	Jumlah Piutang Per Juni 2022 s.d September 2023	Bulan					Total	Sisa Setoran
				Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember		
1	BPSIP BABEL	Dr.Irma Audiah Fachrista,S.P,MM	21.910.000	1.369.375	1.369.375	1.369.375	1.369.375	1.369.375	6.846.875	15.063.125
2		Dian Yunita Rinawati, SP,M.Si	3.900.000	975.000	975.000	975.000		975.000	3.900.000	-
3		Zikril Hidayat, S.Pt, M.Si	21.910.000	1.369.375	1.369.375	1.369.375	1.369.375	1.369.375	6.846.875	15.063.125
4		Dr.Issukindarsyah,SP,M.Si	10.270.000	641.875	641.875	641.875	641.875	641.875	3.209.375	7.060.625
5		Fitria Yuliani,SP,M.Si	7.280.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	2.275.000	5.005.000
6		Muzammil,SP	13.300.000	831.750	831.250	831.250	831.250	831.250	4.156.750	9.143.250
7		Nuraini,S.Pt, M.Sc	10.270.000	641.750	641.875	641.875	641.875	641.875	3.209.250	7.060.750
8		Tri Wahyuni, SP	7.800.000	487.500	487.500	487.500	487.500	487.500	2.437.500	5.362.500
		Jumlah	96.640.000	6.771.625	6.771.250	6.771.250	5.796.250	6.771.250	32.881.625	63.758.375